



Analisis Tata Kelola Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

Indrika Amanda Junita Panggur^{1*}, Amelia Irnawati Nendong², Delma Dassi³

¹⁻³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: amandapanggur@gmail.com

Abstract. *Flooding is one of the most frequent hydrometeorological disasters occurring in Kupang City and has significant social, economic, and environmental impacts. Oesapa Village, located in Kelapa Lima District, is one of the coastal areas with a relatively high level of vulnerability to flooding due to high rainfall intensity, rapid residential development, and the suboptimal condition of the drainage system. This study aims to analyze flood disaster management governance in Oesapa Village, Kelapa Lima District, Kupang City. The research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from various secondary sources, including scientific journals, policy documents, disaster reports, laws and regulations, and other relevant official publications. Data analysis was conducted using content analysis through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Government of Kupang City has implemented various flood mitigation programs, including drainage construction, water channel normalization, disaster mitigation socialization, and institutional capacity strengthening. However, flooding continues to occur due to infrastructure limitations, low public awareness regarding environmental management, and suboptimal coordination among stakeholders. Analysis based on the Collaborative Governance perspective reveals that the success of flood disaster management is highly influenced by collaboration among government institutions, local communities, and other relevant actors. Therefore, strengthening a more integrated, participatory, and sustainable disaster governance system is necessary to enhance the effectiveness of flood disaster management in Oesapa Village.*

Keywords: *Collaborative Governance; Disaster Governance; Disaster Mitigation; Flood; Oesapa.*

Abstrak. Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Kota Kupang dan menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan. Kelurahan Oesapa sebagai salah satu wilayah pesisir di Kecamatan Kelapa Lima memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap kejadian banjir akibat tingginya curah hujan, pertumbuhan kawasan permukiman, serta belum optimalnya sistem drainase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Data diperoleh melalui berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan kebencanaan, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan berbagai program penanggulangan banjir melalui pembangunan drainase, normalisasi saluran air, sosialisasi mitigasi bencana, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Namun demikian, kejadian banjir masih terus terjadi akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Analisis menggunakan perspektif *Collaborative Governance* menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan banjir sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola bencana yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir di Kelurahan Oesapa.

Kata Kunci: Banjir; *Collaborative Governance*; Mitigasi Bencana; Oesapa; Tata Kelola Bencana.

1. LATAR BELAKANG

Bencana banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, aktivitas ekonomi, infrastruktur, serta kualitas lingkungan. Peningkatan intensitas curah hujan, perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan kawasan permukiman, dan menurunnya daya dukung lingkungan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya banjir di berbagai

wilayah perkotaan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penanggulangan banjir tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga tata kelola bencana yang efektif melalui koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, serta implementasi kebijakan yang tepat sasaran.

Oleh karena itu, tata kelola penanggulangan bencana menjadi salah satu aspek penting dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman banjir. Di Kota Kupang, banjir masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang terus terjadi setiap musim penghujan. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi adalah Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima. Pada tahun 2025 dan 2026, beberapa kawasan di Oesapa kembali mengalami genangan akibat hujan dengan intensitas tinggi yang diperparah oleh kondisi drainase yang belum optimal.

Kejadian tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir masih menjadi ancaman nyata yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Secara teoretis, tata kelola penanggulangan bencana merupakan proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil dalam suatu sistem yang terkoordinasi. Tata kelola yang efektif ditandai dengan adanya koordinasi kelembagaan yang baik, implementasi program yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko bencana secara komprehensif.

Selain itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola bencana yang efektif. Sebagai upaya mengurangi risiko banjir, Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan berbagai program seperti pembangunan drainase, normalisasi saluran air, sosialisasi mitigasi bencana, serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui BPBD. Namun demikian, kejadian banjir masih terus terjadi di Kelurahan Oesapa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara program yang telah direncanakan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan kata lain, berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mengurangi tingkat kerentanan wilayah terhadap ancaman banjir.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas mitigasi banjir dari aspek teknis maupun kapasitas masyarakat. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji tata kelola penanggulangan bencana banjir pada tingkat kelurahan di wilayah pesisir perkotaan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis tata kelola penanggulangan bencana banjir

melalui sintesis berbagai dokumen kebijakan, laporan kebencanaan, dan hasil penelitian terdahulu sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tata kelola bencana pada tingkat lokal.

Kelurahan Oesapa merupakan salah satu kawasan strategis di Kecamatan Kelapa Lima yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir. Penelitian ini menggunakan perspektif *Collaborative Governance* untuk menganalisis koordinasi kelembagaan, implementasi program, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di tingkat lokal.

2. KAJIAN TEORITIS

Tata Kelola Bencana

Tata kelola bencana (*disaster governance*) merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko bencana secara terintegrasi melalui keterlibatan berbagai aktor dan institusi yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Konsep ini berkembang seiring meningkatnya kompleksitas ancaman bencana yang tidak lagi dapat ditangani hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam perspektif tata kelola modern, bencana dipandang bukan hanya sebagai peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan, tetapi juga sebagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang memerlukan pendekatan multidimensional dalam pengelolaannya.

Menurut Djalante et al. (2021), tata kelola bencana mencakup berbagai mekanisme pengambilan keputusan, koordinasi kelembagaan, implementasi kebijakan, serta pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Tata kelola bencana yang efektif ditandai oleh adanya koordinasi yang baik antar lembaga, kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, ketersediaan regulasi yang mendukung, serta partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tata kelola bencana juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak meningkatkan risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, penyelenggaraan tata kelola bencana diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan responsif menuju pendekatan preventif yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, tata kelola bencana tidak hanya berfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Dalam konteks penelitian ini, tata kelola bencana dipahami sebagai kemampuan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengelola risiko banjir melalui kebijakan, koordinasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta berbagai program mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan wilayah terhadap ancaman banjir di Kelurahan Oesapa.

Penanggulangan Bencana Banjir

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya berupa kerusakan fisik pada infrastruktur dan permukiman, tetapi juga mencakup terganggunya aktivitas ekonomi, meningkatnya risiko penyakit, kerusakan lingkungan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Dalam wilayah perkotaan, risiko banjir cenderung meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan air, dan tidak memadainya sistem drainase.

Penanggulangan bencana banjir merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh banjir melalui kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Menurut BNPB (2024), penanggulangan banjir harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan agar mampu menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik seperti drainase, tanggul, dan saluran air, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pendekatan struktural dalam penanggulangan banjir biasanya dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, termasuk normalisasi sungai, peningkatan kapasitas drainase, pembangunan embung, serta pengelolaan daerah aliran sungai. Sementara itu, pendekatan nonstruktural dilakukan melalui penyusunan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan kebencanaan, pengembangan sistem peringatan dini, serta

penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara seimbang agar mampu menghasilkan sistem penanggulangan banjir yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kelurahan Oesapa, penanggulangan banjir menjadi sangat penting mengingat wilayah ini merupakan kawasan pesisir yang mengalami perkembangan permukiman dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan sehingga memperbesar risiko terjadinya banjir, terutama pada saat musim penghujan.

Collaborative Governance

Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell & Gash, (2008) sebagai teori utama dalam menganalisis tata kelola penanggulangan bencana banjir. *Collaborative governance* merupakan suatu model tata kelola yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Teori ini lahir dari kesadaran bahwa berbagai permasalahan publik yang kompleks tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh pemerintah tanpa melibatkan pihak lain yang memiliki sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas yang relevan.

Ansell & Gash, (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan pengaturan kelembagaan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik secara langsung dengan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan bertujuan untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam model ini, keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam konteks penanggulangan bencana banjir, *collaborative governance* menjadi sangat relevan karena banjir merupakan masalah yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan infrastruktur, tetapi keberhasilan program pengurangan risiko banjir juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, dukungan sektor swasta, kontribusi akademisi, dan peran organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola bencana yang efektif.

Menurut Ansell dan Gash, proses kolaborasi yang efektif ditandai oleh adanya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan antar aktor, komitmen terhadap tujuan bersama, serta pemahaman yang sama mengenai masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, teori

collaborative governance digunakan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah daerah, BPBD, pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya telah membangun kerja sama dalam upaya penanggulangan banjir di Kelurahan Oesapa.

Good Governance dalam Penanggulangan Bencana

Konsep *good governance* merupakan salah satu paradigma penting dalam administrasi publik yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis, transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *Good governance* tidak hanya berorientasi pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan serta keterbukaan.

Menurut United Nations Development Programme, *good governance* merupakan pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola berbagai urusan publik pada semua tingkatan pemerintahan secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam konteks kebencanaan, penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting karena penanggulangan bencana melibatkan penggunaan sumber daya publik, pengambilan keputusan yang cepat, serta pelayanan kepada masyarakat yang berdampak.

Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kebencanaan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kebencanaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi pelaksanaannya. Akuntabilitas mengharuskan setiap lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Sementara itu, efektivitas dan responsivitas menuntut pemerintah untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ketika menghadapi situasi bencana.

Dalam tata kelola penanggulangan banjir di Kelurahan Oesapa, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai program mitigasi dan penanganan banjir dapat dilaksanakan secara optimal. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip tersebut, semakin besar pula peluang terciptanya sistem penanggulangan bencana yang efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko banjir.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui metode studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih untuk menganalisis tata kelola penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang berdasarkan berbagai sumber data sekunder yang relevan. Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir dan tata kelola kebencanaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi sehingga diperoleh data yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Banjir di Kelurahan Oesapa

Kelurahan Oesapa merupakan salah satu wilayah pesisir yang berada di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini mengalami perkembangan permukiman dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat sehingga menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap kapasitas lingkungan. Pertumbuhan kawasan terbangun yang tidak diimbangi dengan pengelolaan drainase yang memadai mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air dan meningkatnya potensi genangan saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Selain faktor curah hujan, kondisi saluran drainase yang mengalami sedimentasi dan penyumbatan akibat sampah juga menjadi faktor yang memperbesar risiko banjir di wilayah tersebut.

Banjir yang terjadi di Kelurahan Oesapa tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Genangan yang terjadi pada kawasan permukiman dan ruas jalan menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat serta menurunkan kualitas lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir telah menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan tata kelola bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Tata Kelola Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Kota Kupang

Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan berbagai upaya dalam mengurangi risiko banjir melalui program pembangunan dan rehabilitasi drainase, normalisasi saluran air, pembersihan lingkungan, serta sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan wilayah yang lebih tangguh terhadap ancaman banjir.

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, efektivitas tata kelola penanggulangan banjir masih menghadapi sejumlah tantangan. Kejadian banjir yang masih berulang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan yang ada. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola bencana tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memerlukan koordinasi kelembagaan yang kuat, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

Peran BPBD Kota Kupang dalam Penanggulangan Banjir

Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kota Kupang berperan penting dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan kebencanaan. Peran tersebut meliputi penyusunan rencana penanggulangan bencana, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, serta koordinasi penanganan darurat ketika banjir terjadi. Melalui berbagai program tersebut, BPBD berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi ancaman bencana.

Namun demikian, pelaksanaan tugas BPBD masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung kebencanaan. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah serta kerja sama dengan berbagai pihak agar kapasitas BPBD dalam melaksanakan tugasnya dapat semakin meningkat.

Analisis *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Banjir

Berdasarkan perspektif *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, (2008), keberhasilan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanggulangan banjir di Kelurahan Oesapa telah melibatkan

berbagai pihak, seperti Pemerintah Kota Kupang, BPBD, pemerintah kelurahan, masyarakat, serta organisasi sosial yang memiliki perhatian terhadap isu kebencanaan.

Meskipun demikian, tingkat kolaborasi yang terbangun masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program penanggulangan banjir. Selain itu, koordinasi antar lembaga masih cenderung bersifat sektoral sehingga beberapa program belum terintegrasi secara maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola bencana memerlukan penguatan komunikasi, pembangunan kepercayaan antar aktor, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan pengurangan risiko banjir.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tata kelola penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Oesapa. Pertama, keterbatasan kapasitas infrastruktur drainase menyebabkan air hujan tidak dapat dialirkan secara optimal sehingga menimbulkan genangan pada beberapa titik rawan banjir. Kedua, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menyebabkan saluran drainase sering tersumbat oleh sampah dan sedimentasi.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya kelembagaan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program mitigasi bencana. Hambatan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penanggulangan banjir sehingga efektivitas program yang dilaksanakan belum mencapai hasil yang diharapkan. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan banjir tidak hanya berkaitan dengan faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir di Kelurahan Oesapa, diperlukan berbagai strategi yang berorientasi pada penguatan tata kelola bencana. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga melalui forum komunikasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan koordinasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan secara terintegrasi dan saling mendukung.

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat harus diposisikan sebagai mitra strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana, bukan hanya sebagai penerima manfaat program. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur drainase, mengembangkan sistem peringatan dini, serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan. Melalui strategi tersebut, diharapkan tata kelola penanggulangan bencana banjir

di Kelurahan Oesapa dapat menjadi lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman banjir.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa tata kelola penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Oesapa telah dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah kelurahan, dan masyarakat melalui pembangunan serta rehabilitasi drainase, normalisasi saluran air, sosialisasi kebencanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Namun, banjir yang masih terjadi secara berulang mengindikasikan bahwa efektivitas tata kelola belum optimal. Berdasarkan perspektif *Collaborative Governance*, keberhasilan penanggulangan banjir dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarpemangku kepentingan, kecukupan infrastruktur, ketersediaan sumber daya, serta tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko banjir.

Pemerintah Kota Kupang perlu memperkuat tata kelola penanggulangan banjir melalui peningkatan kapasitas infrastruktur drainase, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan mitigasi bencana. Di samping itu, edukasi mengenai pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko banjir. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dan observasi lapangan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi tata kelola penanggulangan banjir di Kelurahan Oesapa maupun wilayah lain dengan karakteristik yang serupa.

DAFTAR REFERENSI

- Aldrich, D. P. (2021). *Building resilience: Social capital in post-disaster recovery*. University of Chicago Press.
- Al-Hujran, O., Al-Debei, M. M., Chatfield, A. T., & Migdadi, M. M. (2015). The imperative of influencing citizen attitude toward e-government adoption and use. *Computers in Human Behavior*, 53, 189–203. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.025>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Indeks risiko bencana Indonesia tahun 2024*. BNPB.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Data informasi bencana Indonesia tahun 2025*. BNPB.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang. (2025). *Laporan kinerja BPBD Kota Kupang tahun 2025*. BPBD Kota Kupang.
- Cutter, S. L., Ash, K. D., & Emrich, C. T. (2022). The geographies of community disaster resilience. *Global Environmental Change*, 72, Article 102415. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102415>
- Djalante, R., Shaw, R., & DeWit, A. (2021). Building resilience against biological hazards and pandemics: COVID-19 and its implications for disaster risk reduction. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 56, Article 102130. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102130>
- Handayani, W., Fisher, M. R., Rudiarto, I., Sih Setyono, J., & Foley, D. (2023). Urban flood governance and resilience in Indonesian cities. *Sustainability*, 15(7), Article 6021. <https://doi.org/10.3390/su15076021>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. IPCC.
- Kurniawan, B., Yusuf, M., & Setiawan, A. (2022). Disaster risk reduction and local government capacity in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 155–171.
- Lestari, P., Hadi, S., & Nugroho, A. (2023). Community participation in disaster risk reduction: Lessons from local communities in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 78–92.
- Mardiah, A., & Winarno, B. (2022). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di wilayah perkotaan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(2), 143–157.
- Nugroho, T., & Hadi, S. (2023). Policy implementation in disaster management: Challenges and opportunities in local governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 101–117.
- Pratama, D., & Widodo, E. (2024). Collaborative governance in disaster management: Evidence from Indonesian local governments. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(1), 45–61.
- Rahman, F., Abdullah, M., & Yusuf, H. (2022). Disaster governance and community resilience in disaster-prone regions. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 68, Article 102714. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102714>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Santoso, B., Kurniawati, R., & Putri, D. (2024). Local disaster management capacity in Indonesian cities. *Jurnal Bencana Indonesia*, 8(1), 33–48.
- Sari, N., Wijaya, A., & Prasetyo, H. (2023). Urban flood mitigation and community awareness in developing cities. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 21(3), 210–225.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2023). *Global assessment report on disaster risk reduction 2023*. UNDRR.
- Wulandari, R., Putra, A., & Setyawan, D. (2024). Good governance in disaster management: Strengthening public sector accountability. *Jurnal Governance*, 9(2), 112–128.

- Yuliana, D., Siregar, M., & Hanafiah, A. (2025). Coastal flood mitigation strategies in urban areas: Lessons for local governments. *International Journal of Environmental Studies*, 82(2), 155–172. <https://doi.org/10.1080/00207233.2024.XXXXX>
- Yusran, R., Fitriani, S., & Arifin, Z. (2022). Disaster governance and public participation in flood management. *Jurnal Manajemen Bencana Indonesia*, 4(2), 87–101.
- Zhang, Y., Wang, J., & Li, X. (2024). Collaborative governance and disaster resilience: A comparative study in Asia. *International Journal of Disaster Risk Science*, 15(1), 45–59. <https://doi.org/10.1007/s13753-024-00455-8>